



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KOTA DENPASAR

II.1. Tugas , Fungsi dan Struktur Organisasi Badan KBPP Kota Denpasar

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih (Good Governance) maka penyusunan rencana kinerja setiap awal tahun merupakan suatu keharusan. Rencana Kinerja Tahunan didasarkan pada struktur organisasi daerah, di mana Badan Keluarga Berencana dan pemberdayaan Perempuan Kota Denpasar sebagai salah satu Satuan Kerja Pemerintah daerah (SKPD), sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah berfungsi dalam Pengelolaan Perencanaan Umum Pemerintah, Pengendalian Hasil Pembangunan dan Pengendalian Tata Ruang wajib melaporkan hasil kerjanya guna mewujudkan Good Governance.

II. 1.1. Tugas Pokok dan Fungsi Badan

Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Denpasar mempunyai Tugas Pokok : Membantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan.

Fungsi :

- a. Perumusan Kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Pemberian dukungan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah



II.1.2. Struktur Organisasi dan Uraian Tugas

Adapun Susunan Organisasi dan uraian tugas Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Kota Denpasar sebagai berikut

:

1. Kepala Badan mempunyai tugas :
 - a. menetapkan program kerja Badan Keluarga Berencana dan pemberdayaan perempuan berdasarkan Rencana Strategis Badan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Badan Keluarga Berencana dan pemberdayaan perempuan sesuai dengan program yang telah ditetapkan dan kebijakan pimpinan agar target kerja tercapai sesuai rencana ;
 - c. membina bawahan di lingkungan Badan Keluarga Berencana dan pemberdayaan Perempuan dengan cara mengadakan rapat / pertemuan dan bimbingan secara berkala agar diperoleh kinerja yang diharapkan ;
 - d. mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan, dan hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas ;
 - e. membuat perumusan kebijakan teknis Bidang Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - f. menyelenggaraan pelayanan umum, urusan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan yang meliputi



- Bidang Data dan Informasi , Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, Bidang Penggerakan Masyarakat, Bidang Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga , peran perempuan dan perlindungan anak;
- g. membina dan melaksanakan kerjasama dengan instansi dan organisasi lain sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas ;
 - h. melaksanakan pembinaan kesekretariatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk terciptanya tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;
 - i. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dengan cara membandingkan antara program kerja dan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana kerja yang akan datang ;
 - j. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas kinerja; dan
 - k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Kepala Badan dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.



2. Sekretariat mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana operasional di lingkungan Sekretariat berdasarkan rencana program Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada Kepala Sub Bagian di lingkungan Sekretariat sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat dijalankan efektif dan efisien;
- c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Kepala Sub Bagian di lingkungan Sekretariat sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan ;
- e. mengkoordinasikan penyusunan rencana operasional dan penyelenggaraan tugas-tugas Bidang serta memberikan pelayanan administrasi sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan agar target kerja tercapai;
- f. mengkoordinasikan, menghimpun dan menyusun Perencanaan dan Evaluasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman penyusunan program dan kegiatan Badan;



-
- g. mengkoordinir penyusunan usulan RKA/DPA sesuai dengan rencana strategis sebagai bahan usulan rencana kegiatan tahunan;
 - h. melaksanakan urusan Perencanaan , Data dan Informasi sesuai dengan Bidang tugas sebagai dasar untuk penyusunan program Badan ;
 - i. mengoreksi laporan kegiatan dan kinerja Badan sesuai prosedur yang berlaku sebagai bahan laporan pertanggungjawaban;
 - j. melaksanakan urusan Kepegawaian berdasarkan peraturan yang berlaku untuk terciptanya tertib administrasi kepegawaian;
 - k. melaksanakan urusan umum, Perlengkapan dan Rumah Tangga serta melaksanakan pengawasan aset sesuai peraturan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - l. melaksanakan urusan Keuangan sesuai peraturan yang berlaku untuk terciptanya tertib administrasi keuangan;
 - m. mengevaluasi pelaksanaan tugas Sekretariat dengan cara membandingkan antara operasional dan tugas tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
 - n. membuat laporan pelaksanaan tugas Sekretariat sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas Sekretariat ;dan
 - o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.



Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;

Sekretariat terdiri dari :

1. Sub Bagian Perencanaan;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 3. Sub Bagian Keuangan
3. Bidang Data dan Informasi mempunyai tugas ;
- a. menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Data dan Informasi berdasarkan rencana program Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan tugas kepada Kepala Sub Bidang di lingkungan Bidang Data dan Informasi sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat dijalankan efektif dan efisien;
 - c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepala Sub Bidang di lingkungan Bidang Data dan Informasi sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas ;
 - d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Data dan Informasi secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharap;
 - e. melaksanakan penerapan kebijakan dan pengembangan system data dan informasi program serta data mikro kependudukan dan keluarga sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan perencanaan;



- f. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- g. mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Data dan Informasi dengan cara membandingkan antara rencana operasional dan tugas tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
- h. membuat laporan pelaksanaan tugas Bidang Data dan Informasi sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas Bidang Data dan Informasi ; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Bidang Data dan Informasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan melalui Sekretaris Badan.

Bidang data dan Informasi terdiri dari :

1. Sub Bidang Pelaporan dan Pengolahan Data;
2. Sub Bidang Data dan Evaluasi Program.

4. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera berdasarkan rencana program Badan Keluarga Berencana dan



- Pemberdayaan Perempuan serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada kepala Sub Bidang di lingkungan Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat dijalankan efektif dan efisien;
 - c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Kepala Sub Bidang di lingkungan Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
 - d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
 - e. melaksanakan dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan pengendalian program jaminan dan pelayanan Keluarga Berencana, Kesehatan Reproduksi , peningkatan partisipasi pria dalam program keluarga berencana, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi dan kesehatan reproduksi remaja sesuai prosedur yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - f. mengendalikan pelaksanaan kebijakan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi (KB-KR) meliputi jaminan dan pelayanan KB , peningkatan partisipasi pria dalam program keluarga berencana, penanggulangan masalah



- kesehatan reproduksi dan sesuai prosedur agar target tercapai;
- g. mengevaluasi pelaksanaan kebijakan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi (KB-KB) meliputi jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria dalam program keluarga berencana , penanggulangan masalah kesehatan reproduksi dan kesehatan reproduksi sesuai prosedur yang berlaku sebagai bahan laporan kepada pimpinan;
 - h. mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dengan cara membandingkan antara rencana operasional dan tugas tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
 - i. membuat laporan pelaksanaan tugas Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera; dan
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan melalui Sekretaris Badan.

Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera terdiri dari :



1. Sub Bidang Operasional KB/KR;
2. Sub Bidang Operasional KS/PK

5. Bidang Penggerakan Masyarakat mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana operasional dilingkungan Bidang Penggerakan Masyarakat berdasarkan rencana program Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada Kepala Sub Bidang di lingkungan Bidang Penggerakan Masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat dijalankan efektif dan efisien;
- c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Kepala Sub Bidang di lingkungan Bidang Penggerakan Masyarakat sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan Bidang Penggerakan Masyarakat secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan ;
- e. melaksanakan perlindungan Hak Reproduksi Individu (Papsmear) sesuai prosedur yang berlaku untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- f. melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi program KHIBA (Kelangsungan Hidup Ibu, Bayi dan Anak), program KRR masalah HIV-AIDS, program advokasi dan KIE sesuai prosedur yang berlaku agar target kinerja tercapai;



- g. mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Perencanaan Masyarakat dengan cara membandingkan antara rencana operasional dan tugas tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
- h. membuat laporan pelaksanaan tugas Bidang Penggerakan Masyarakat sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas Bidang Penggerakan Masyarakat; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Bidang Penggerakan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan melalui Sekretaris Badan.

Bidang Penggerakan Masyarakat terdiri dari :

- 1. Sub Bidang Institusi dan Peran Serta;
- 2. Sub Bidang advokasi dan KIE.

6. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan rencana program Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada Kepala Sub Bidang di lingkungan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan



- Perlindungan Anak sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat dijalankan efektif dan efisien;
- c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Kepala Sub Bidang dilingkungan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
 - d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
 - e. melaksanakan koordinasi , sosialisasi dan advokasi pelaksanaan kebijakan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai prosedur yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - f. mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan cara membandingkan antara rencana operasional dan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
 - g. membuat laporan pelaksanaan tugas Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ;dan
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.



Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan melalui Sekretaris.

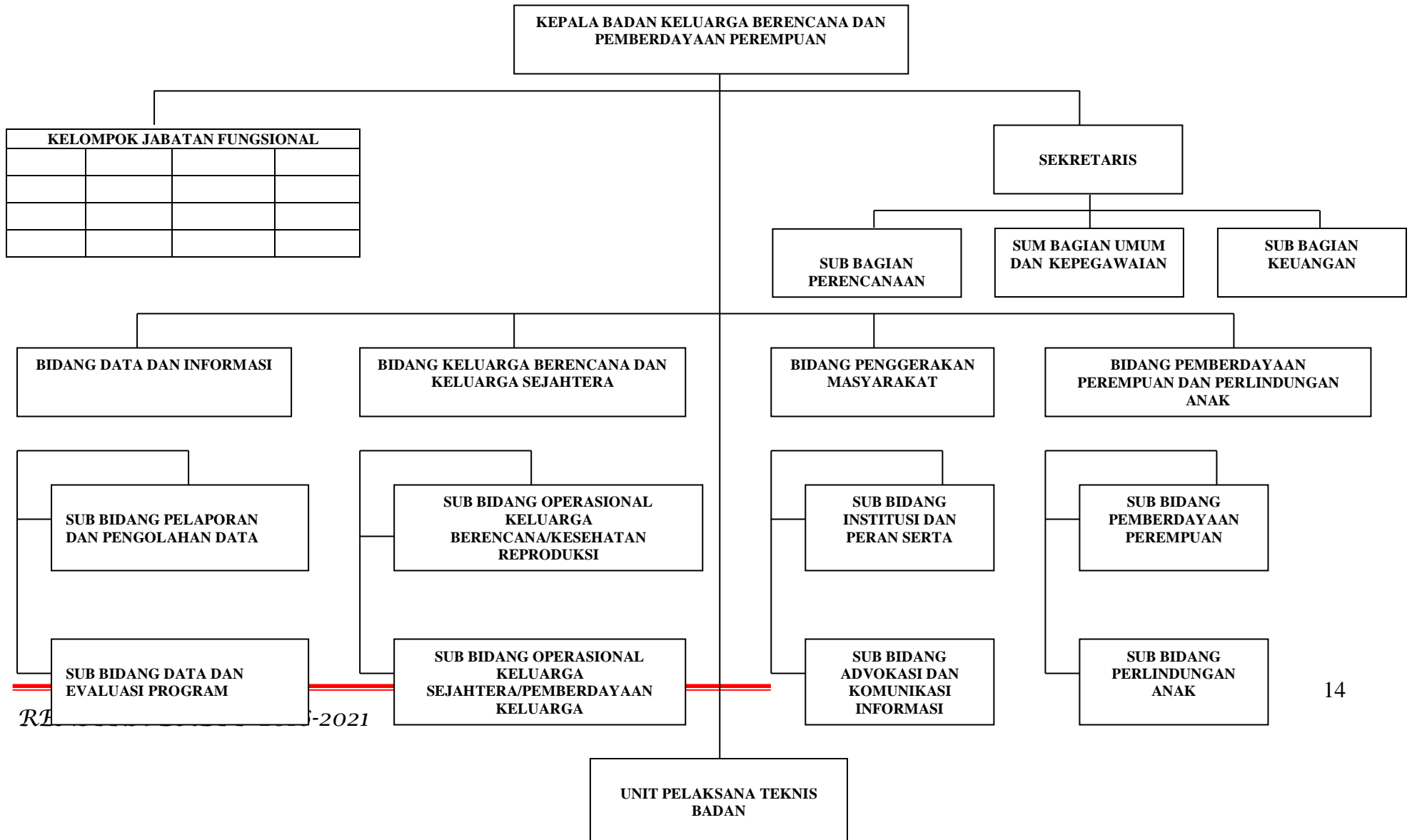
Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdiri dari :

- a. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan; dan
- b. Sub Bidang Perlindungan Anak

Bagan Struktur Organisasi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Kota Denpasar sebagai berikut :



BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KOTA DENPASAR





II.2 Sumber Daya Manusia Badan KBPP Kota Denpasar

Jumlah personil Aparatur Sipil Negara pada Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Denpasar pada tahun 2015 sebanyak 98 (sembilan puluh delapan orang) yang terdiri dari : Pegawai Negeri Sipil sebanyak 66 (enam puluh enam) orang dan Tenaga kontrak sebanyak 32 (tiga puluh dua) orang.

Tabel 2.1 Klasifikasi Tingkat Pendidikan Pegawai Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Denpasar

NO	Jenis Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	S2	1 orang	4 orang	5 orang
2	S1	8 orang	29 orang	37 orang
3	D3	4 orang	2 orang	6 orang
4	SLTA	5 orang	13 orang	18 orang
	Jumlah	18 orang	48 orang	66 orang

Tabel 2.2 Kalisifikasi Tingkat Pangkat/Golongan Pegawai Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Denpasar .

NO	Golongan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	IV/c		1 orang	1 orang
2	IV/b		1 orang	1 orang
3	IV/a	2 orang	11 orang	13 orang



4	III/d	8 orang	18 orang	26 orang
5	III/c	6 orang	7 orang	13 orang
6	III/b		1 orang	1 orang
7	III/a	2 orang	4 orang	6 orang
8	II /c	1 orang	1 orang	2 orang
9	II /b	1 orang	2 orang	3 orang
10	Tenaga Kontrak	23 orang	9 orang	32 orang
	Jumlah	43 orang	55 orang	98 orang

Tabel 2.3 Klasifikasi Tingkat Jabatan Pegawai Badan Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Denpasar

NO	Jabatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Eselon II		1 orang	1 orang
2	Eselon III	2 orang	3 orang	5 orang
3	Eselon IV	7 orang	12 orang	19 orang
4	Penyuluh KB	9 orang	23 orang	32 orang
5	Fusional Umum	2 orang	7 orang	9 orang
6	Tenaga Kontrak	9 orang	23 orang	32 orang
	Jumlah	29 orang	69 orang	98 orang

B. Asset yang dikelola oleh Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Denpasar . Pada Tahun 2014 dengan rincian sebagai berikut :



Tabel 2.4 Asset yang di kelola Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Denpasar.

NO	Nama Barang	Satuan	Jumlah	Harga satuan	Total
1	Belanja Modal Pengadaan Alat Pendingin (AC)	buah	1	4,750,000	4,750,000
2	Belanja Modal Pengadaan Alat Pendingin (AC) 2 pk	buah	1	9,550,000	9,550,000
3	Belanja Modal Pengadaan White Board	buah	4	742,500	2,970,000
4	Belanja Modal Pengadaan Penunjuk Waktu/Jam Dinding	buah	2	495,000	990,000
5	Belanja Modal Pengadaan Korden lengkap dengan rel dan asesoris	m2	4.05	950,000	3,847,500
6	Belanja Modal Pengadaan Korden lengkap dengan rel dan asesoris	m2	2.55	160,000	408,000
7	Belanja Modal Pengadaan Korden lengkap dengan rel dan asesoris	m2	18.40	244,500	4,498,800
8	Belanja Modal Pengadaan Komputer /PC	unit	1	10,675,000	10,675,000
9	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	unit	1	15,000,000	15,000,000
10	Belanja Modal pengadaan Printer	unit	1	8,700,000	8,700,000
11	Belanja Modal pengadaan Printer	unit	2	6,125,000	12,250,000
12	Belanja Modal pengadaan Printer	unit	2	1,250,000	2,500,000
13	Belanja Modal Pengadaan CPU	buah	2	8,250,000	16,500,000
14	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja Kepala Badan	buah	1	8,470,000	8,470,000
15	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja Kepala Bidang	buah	5	7,350,000	36,750,000



16	Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat Kepala Badan	buah	1	18,535,000	18,535,000
17	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat Kepala	buah	10	1,250,000	12,500,000
18	Belanja Modal Pengadaan Rak Buku	buah	6	4,235,000	25,410,000
19	Belanja Modal Pengadaan Meja Komputer	buah	1	1,475,000	1,475,000
20	Belanja Modal Pengadaan Meja Komputer uk. 120x74x75cm	buah	2	1,650,000	3,300,000
21	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja Kepala Badan	buah	1	8,470,000	8,470,000
22	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja Kepala Bidang	buah	5	7,350,000	36,750,000
23	Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat Kepala Badan	buah	1	18,535,000	18,535,000
24	Belanja Modal Pengadaan Meja Komputer uk. 100x74x75cm	buah	2	1,550,000	3,100,000
25	Belanja Modal Pengadaan Kursi Putar	buah	1	675,000	675,000
26	Belanja Modal Pengadaan Kursi Putar	buah	2	700,000	1,400,000
27	Belanja Modal Pengadaan Kursi Eselon IV	buah	11	450,000	4,950,000
28	Belanja Modal Pengadaan Kursi Tamu Kepala Bidang	Set	1	6,930,000	6,930,000
29	Belanja Modal Pengadaan Jok Kursi Tamu Kepala Bidang	Set	4	2,950,000	11,800,000
30	Belanja Modal Pengadaan Meja Telpon Kepala Bidang	buah	4	1,450,000	5,800,000
31	Belanja Modal Pengadaan Meja Komputer uk. 100x74x75cm	buah	1	1,600,000	1,600,000
32	Belanja Modal Pengadaan Karpas untuk Kepala Badan	m2	30.62	220,000	6,736,400
33	Belanja Modal Pengadaan Karpas untuk Kepala Bidang	m2	58.26	150,000	8,739,000
34	Belanja Modal Pengadaan Kamera	buah	1	9,350,000	9,350,000
35	Belanja Modal Pengadaan LCD Proyektor + Layar + Breaiket Motoris	Set	1	24,200,000	24,200,000
36	Belanja Modal Pengadaan Sound System	unit	1	22,770,000	22,770,000



37	Belanja Modal Pengadaan Multimedia (Tablet PC)	buah	1	11,800,000	11,800,000
38	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan Gedung Kantor	unit	1	194,061,000	194,061,000
	Total				512,990,700

II.3 Kinerja Pelayanan Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Denpasar .

Berdasarkan gambaran kinerja dimana secara garis besarnya, hasil pencapaian (outcome) pada Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Denpasar adalah sebagai berikut :

Hasil pencapaian kinerja Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan menurut Bidang :

a. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Tabel 2.5 Cakupan Laporan Hasil Pelayanan KB tahun 2014

No	Uraian	Yang Ada	Tahun 2013	Tahun 2014	Cakupan Laporan Tahun 2014
1	Kecamatan	4	4	4	100 %
2	KKB	48		48	100%



	Pemerintah				
3	KKB Swasta	26		26	100%
4	Dokter Praktek Swasta	43		43	100%
5	Bidan Praktek Swasta	117		117	100%

Tabel 2.6 Realisasi Pencapaian Peserta KB Baru Menurut metode Kontrasepsi Tahun 2014

No	MIX Kontrasepsi	PPM PB Tahun2014	Realisasi	% Realisasi PPM
1	IUD	3319	4381	132,00
2	MOW	1146	1216	106,11
3	MOP	18	21	116,67
4	KONDOM	791	1674	211,63
5	IMPLANT	475	386	81,26
6	SUNTIKAN	4667	6204	132,93
7	PIL	1140	1161	101,84
	JUMLAH	11556	15043	130,17

Tabel 2.7 Realisasi Pencapaian Peserta KB Aktif menurut metode kotrasepsi tahun 2014



No	MIX Kontrasepsi	PPM PA Tahun 2014	Realisasi	% Realisasi PPM
1	IUD	25352	30578	120,61
2	MOW	4533	4181	92,23
3	MOP	97	91	93,81
4	KONDOM	2046	2993	146,29
5	IMPLANT	230	404	175,65
6	SUNTIKAN	17274	21393	123,85
7	PIL	6558	8713	132,86
	JUMLAH	56090	68353	121,86

b. Bidang Penggerakan Masyarakat

No	Jenis Layanan	Indikator	Target	Realisasi Tahun 2013	Realisasi tahun 2014
1	Komunikasi Informasi Edukasi KB	Cakupan PUS yang istrinya di bawah usia 20 tahun	3,5 %	0,40%	0,40 %
2	Penyediaan Alat dan Obat Kontrasepsi	Cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi	30 %	60%	93 %



		si untuk memenuh i perminta an masyarak at			
--	--	--	--	--	--

c. Bidang Data dan Informasi

No	Jenis Layanan	Indikator	Target	Realisasi Tahun 2013	Realisasi tahun 2014
1	Penyediaan Data dan Infprmasi	Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa/kelurahan	100%	100 %	100%

d. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak



No	Jenis Layanan	Indikator	Target	Realisasi Tahun 2013	Realisasi tahun 2014
1	Penanganan pengaduan / laporan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak	Jumlah kekerasan perempuan dan anak Jumlah kekerasan perempuan dan anak yang sudah ditangani	100%	35 35	44 44

No	Jenis Layanan	Indikator	Target	Realisasi Tahun 2013	Realisasi tahun 2014
1	2	3	4	5	6
1	Jumlah kekerasan perempuan dan anak	100 %	35	44	100
	Jumlah kekerasan	100 %	35	44	100



	perempuan dan anak yang sudah ditangani				
--	---	--	--	--	--

Realisasi Indikator Kinerja Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Denpasar dari tahun 2011 s/d tahun 2014

No	Uraian	Tahun 2011		2012 .2013				2014	
		Taget	Realisasi	Taget	Realisasi	Taget	Realisasi	Taget	Realisasi
1.	Jumlah seluruh peserta KB Baru	11.543	14.502	13.192	13.644	11.621	16.255	14.344	15.043
2.	Jumlah Peserta KB Baru MKJP	4.263	4.722	4.724	4.699	4.291	6.053	7.696	6.004
3.	Jumlah Peserta KB Baru Pria	788	1.253	1.355	1.052	661	1.362	903	1.695
4	Jumlah seluruh peserta Kb aktif			62.524	67.531	63.917	81.601	66.052	68.353
5	Jumlah Kelompok BKB Paripurna	8	8	36	36	46	46	13	21
6	Jumlah Kelompok BKR Paripurna	4	4	4	4	8	8	8	12
7.	Jumlah Kelompok PIK Remaja (Tahap Tumbuh, Tegak, Tegar)	8	8	9	10	12	10	2	8
8.	Jumlah Kelompok UPPKS	115	95	106	107	106	107	106	106
9	Jumlah kelompok keluarga Pra KS dan KS I anggota kelompok UPPKS yang menjadi peserta KB	85	54,71	70	92,30	70	92,30	23	39
10	Jumlah Kelompok BKL Paripurna				87		84		91



11	Perumusan kebijakan peningkatan peran serta dan posisi perempuan dalam politik dan jabatan public			1 Kali 60 Orang	1 Kali 60 Orang	1 Kali 60 Orang	1 Kali 60 Orang	1 Kali 60 Orang	1 Kali 40 Orang
12	(Sosialisasi yang terkait dengan kekerasan gender dan perlindungan anak)	1 Kali 30 Orang	1 Kali 30 Orang	1 Kali 30 Orang	1 Kali 30 Orang	1 Kali 30 Orang	1 Kali 30 Orang	1 Kali 30 Orang	1 Kali 30 Orang
13	Cakupan Pelaksanaan Kebijakan perlindungan Perempuan Daerah	4 Kecamatan	4 Kecamatan	4 Kecamatan	4 Kecamatan	4 Kecamatan	4 Kecamatan	4 Kecamatan	4 Kecamatan
14	Frekuensi Peningkatan Kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	1 (satu) Orang tokoh Perempuan	1 (satu) Orang tokoh Perempuan	1 (satu) Orang tokoh Perempuan	1 (satu) Orang tokoh Perempuan	1 (satu) Orang tokoh Perempuan	1 (satu) Orang tokoh Perempuan	1 (satu) Orang tokoh Perempuan	1 (satu) Orang tokoh Perempuan
15	Frekuensi Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	125 Orang	125 Orang	125 Orang	125 Orang	125 Orang	125 Orang	125 Orang	125 Orang

Realisasi Indikator Kinerja Utama Badan keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Denpasar : tahun 2011s/d tahun 2014

No	Indikator Kinerja Utama		
----	-------------------------	--	--



		Target Renstra 2015	Capaian 2011	CAPAIAN 2012	Capaian 2013	Capaian 2014
1	Cakupan Pasangan Usia Subur yang isterinya dibawah usia					
	20 tahun	3,50%	0,36 %	0,33 %	0,40 %	0.40 %
2	Cakupan sasaran Pasangan Usia Subur menjadi peserta					
	KB Aktif	65%	82,74 %	82,74 %	83,17 %	83,44%
3	Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak					
	terpenuhi (Unmet Need)	5%	4,65 %	4,99%	4.50%	4,49%
4	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber- KB	70%	85,08 %	83,17%	83,17%	89,88 %
5	Cakupan PUS peserta KB Anggota Usaha Peningkatan					
	Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber- KB	87%	88,14 %	87,51%	87,44 %	85,60 %
6	Ratio Petugas Lapangan Keluarga Berencana/Penyuluh	2	1.05	1.16	100	100
	Keluarga Berencana (PLKB/PKB) 1 petugas dise tiap 2 (dua)					
	Desa/Kelurahan.					
7	Ratio Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD)	1	1	1	1	1
	1 (satu) petugas dise tiap Desa/Kelurahan.					
8	Cakupan penyediaan alat dan obat Kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat 30% setiap tahun.	30%	30 %	30 %	60 %	93 %
9	Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga dise tiap					
	Desa/Kelurahan 100% setiap tahun	100%	100	100%	100 %	100%

II.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Denpasar



Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana merupakan langkah penting dalam mencapai pembangunan secara berkelanjutan. Pengendalian kuantitas penduduk dan kualitas insan dan sumber daya manusia dilakukan melalui pengendalian pertumbuhan penduduk. Dengan disahkannya Undang – undang nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, diharapkan pembangunan kependudukan dan keluarga berencana dapat dilaksanakan lebih optimal.

Beberapa masalah yang masih dihadapi antara lain:

1. Angka pemakaian kontrasepsi jangka panjang makin menurun ;
2. Masih rendahnya pengetahuan remaja tentang Penyiapan Kehidupan Berkeluarga bagi remaja (PKBR);
3. Masih rendahnya pengetahuan Pasangan Usia Subur (PUS) tentang keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi ;
4. Masih rendahnya partisipasi keluarga dalam pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak dan remaja;
5. Belum optimalnya pemanfaatan kelompok-kelompok kegiatan untuk peningkatan, pembinaan, dan kemandirian peserta KB;
Dan meski sudah banyak capaian dan potensi yang dimiliki dalam mendukung terwujudnya kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, serta pemenuhan hak dan perlindungan anak, namun di berbagai bidang masih belum optimal
6. Masih belum sinerginya antara kebijakan kuantitas, kualitas, dan mobilitas, baik secara vertikal maupun horisontal, serta masih terdapatnya kebijakan pembangunan lainnya yang kurang mendukung kebijakan kuantitas penduduk.



7. Rendahnya partisipasi perempuan dalam pembangunan, disamping masih adanya bentuk praktik diskriminasi terhadap perempuan.
8. Kesenjangan partisipasi politik kaum perempuan yang bersumber dari ketimpangan struktur Sosio-kultural masyarakat. Dalam konteks sosial, kesenjangan ini mencerminkan masih terbatasnya akses sebagian besar perempuan terhadap layanan dasar kesehatan yang lebih baik, pendidikan yang lebih tinggi, dan keterlibatan dalam kegiatan politik.
9. Masih lemahnya pemahaman mengenai pengarusutamaan gender dalam pembangunan,
10. Masih terjadi kekerasan dalam rumah tangga yang mana korbannya juga adalah anak-anak, eksploitasi terhadap anak dan pekerja anak.

Posisi Badan Keluarga Berencana dan pemberdayaan Perempuan Kota Denpasar

Berdasarkan analisis SWOT



	<p>PELUANG</p> <ul style="list-style-type: none"> • Komitmen pemerintah yang semakin tinggi untuk penyelenggaraan program KB dan PP • Komitmen mitra kerja yang cukup baik dalam mendukung kebijakan program KB dan PP serta untuk mewujudkan Denpasar menuju Kota Layak Anak 	<p>TANTANGAN</p> <p>Ada kecenderungan penggunaan alkon kb pria menurun Dan ada kecenderungan KDRT , kekerasan anak meningkat</p>
<p>KEKUATAN</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terbentuknya Badan KBPP • Koordinasi dan kemitraan antar lembaga pemerintah dan non pemerintah 	<p>Meningkatkan motivator – motivator KB pria dan sosialisasi mengenai kekerasan KDRT dan Kekerasan terhadap anak</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan SDM petugas KB dalam memberikan KIE tentang KB dan PP
<p>KELEMAHAN</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kualitas dan kuantitas SDM masih kurang • Pemanfaatan teknologi informasi masih terbatas (sarana prasana) • Masih rendahnya pengetahuan dan kesadaran remaja ttg KRR da KB • Belum optimalnya pemanfaatan kelompok kegiatan utk peningkatan,pembinaan, dan kemadirian peserta KB • Meningkatnya KDRT, Kekerasan thd Anak • Masih rendahnya partisipasi keluarga dlm pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak 	<p>Meningkatkan pemahaman dan peran keluarga untuk mewujudkan keluarga kecil dan sejahtera</p>	



Matrik SWOT

<p>IFAS (Faktor Internal)</p> <p>EFAS (Faktor Eksternal)</p>	<p>STRENGHT (S)</p> <ul style="list-style-type: none"> - UUD 1945 - RPJMD dan APBD - Terbentuknya badan KBPP - koordinasi dan kemitraan yg kuat antar lembaga pemerintah - Effktivitas dan Effisiensi dlm pengelolaan program dan kegiatan 	<p>WEAKNESS (W)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kualitas dan kuantitas SDM kurang - Kesenjangan kompetensi PKB - Sarana dan prasarana kurang Memadai - Anggaran sangat terbatas
<p>OPPORTUNITIES (O)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Keikutsertaan Indonesia dlm MDGs - Terbitnya UU no 52 thn 2009 - Komitmen pemerintah yg tinggi - Komitmen Mitra kerja cukup baik - Keinginan masy mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera - Pencanangan Denpasar Kota Layak Anak 	<p>STRATEGI SO</p> <ul style="list-style-type: none"> - Revitalisasi program KB - Memperkuat kelembagaan pengarus Utamaan Gender -Meningkatkan kualitas hidup dan perlindungan perempuan 	<p>STRATEGI WO</p> <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan profesionalisme Aparat Pemerintah daerah - Meningkatkan sarana dan Prasarana aparatur - Melaksanakan penerapan tata Kelola pemerintahan yang baik
<p>TREATHS (T)</p> <ul style="list-style-type: none"> - masyarakat yang menganut Budaya Patrilineal - Meningkatnya KDRT, trafficking - Belum optimalnya pemanfaatan kelompok kegiatan untuk peningkatan pembinaan dan kemandirian Peserta KB - Masih rendahnya pengetahuan dan kesadaran remaja ttg Kesehatan Reproduksi -Masih rendahnya partisipasi 	<p>STRATEGI ST</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memasyarakatkan Penyiapan Kehidupan berkeluarga bagi remaja - Meningkatkan ketahanan dan pemberdayaan keluarga - meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak 	<p>STRATEGI WT</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memperkuat kelembagaan keluarga kecil bahagia dan sejahtera - Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam Pembangunan



Keluarga dlm pengasuhan dan Pembinaan tumbuh kembangan anak dan Remaja		
--	--	--